

BAB I PENDAHULUAN

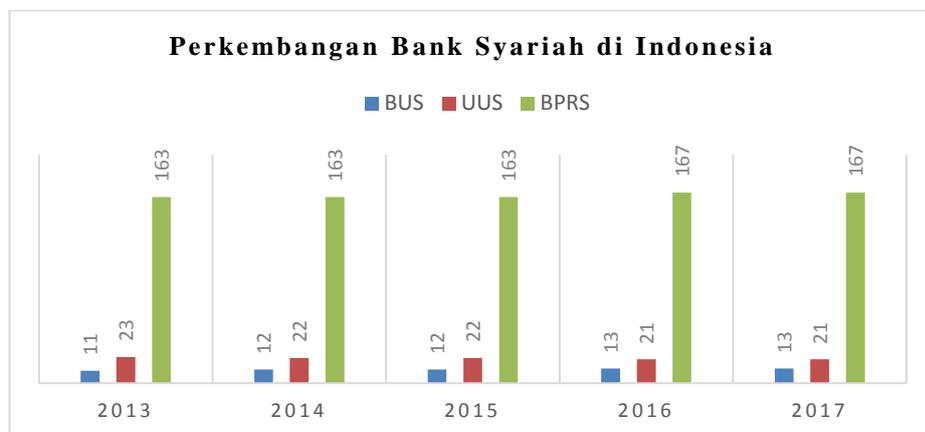
A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dewasa ini memiliki peran yang vital dalam sistem perekonomian negara. Di dalam membangun perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan beberapa pihak antara lain lembaga-lembaga di sektor keuangan, pemerintah, bank, serta para pelaku usaha. Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana pada masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya pada masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana dengan tujuan untuk mensejahterakan taraf hidup rakyat (Sumar'in, 2012).

Bank merupakan lembaga yang dipercaya karena banyak kalangan masyarakat yang menempatkan dananya secara aman, sehingga bank harus menjaga kepercayaan nasabah dengan cara menjaga kinerja bank agar selalu baik dan menjaga tingkat kesehatan bank menggunakan rasio likuiditas untuk memenuhi kewajibannya (Ismail, 2010). Di Indonesia sendiri perbankan menerapkan dual banking sistem yang mana terdapat bank dengan konsep secara umum (Bank Konvensional) serta bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam (Bank Syariah).

Berdasarkan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 , pasal 1 , bab I , ayat 5 dan ayat 7) menyatakan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang dalam aktivitas usahanya secara konvensional serta menurut jenisnya terdiri dari

Bank Umum Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah serta menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut mengenai pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami tumbuh secara signifikan dari tahun 2013-2017:



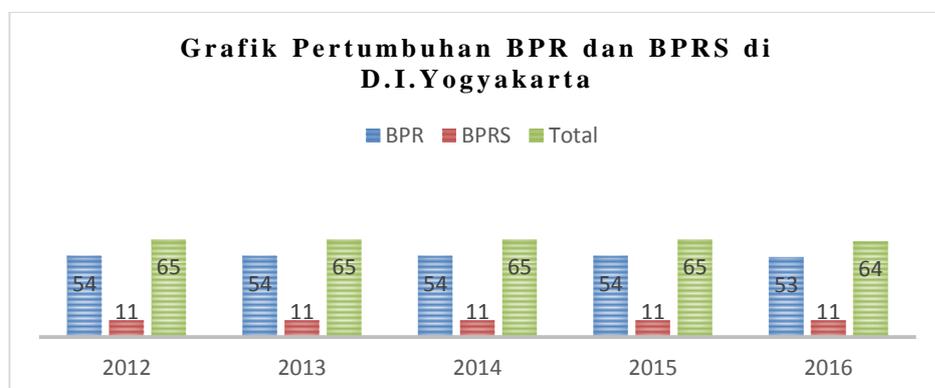
Gambar 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami kenaikan namun pada tahun 2016 perbankan syariah memiliki 13 BUS, 21 UUS dan 167 BPRS. Pada tahun ini UUS mengalami penurunan karena beberapa UUS sudah *spin off* berubah menjadi BUS, kemudian sama halnya dengan BUS di sini BPRS juga mengalami kenaikan. Oleh sebab itu BPRS juga memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian Indonesia salah satunya dengan melayani jasa perbankan untuk masyarakat dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). Bedanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Umum Syariah yaitu di dalam kegiatan usahanya BPRS tidak melayani kegiatan jasa lalu lintas pembayaran (OJK, 2018). Meskipun BPRS memiliki layanan terbatas dalam operasional, namun BPRS tidak kalah saingannya dengan BUS. Keberadaan BPRS menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada sektor produktivitas pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Alasan memilih BPRS di D.I.Yogyakarta karena BPRS memiliki kedekatan yang erat terhadap masyarakat mikro, kecil dan menengah. Sebab pelaku UMKM membutuhkan bantuan pendanaan yang praktis dan mudah dengan lembaga keuangan, melalui pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. Selain itu, karena sektor UMKM banyak jumlahnya hingga mencapai 90%, karena DIY menjadi pusat dari berbagai macam usaha kerajinan, kebudayaan dan kesenian. Perkembangan BPRS di DIY semakin membaik berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat data mengenai pertumbuhan BPRS di D.I.Yogyakarta. Berikut mengenai grafik pertumbuhan BPRS di D.I.Yogyakarta:



Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan BPR dan BPRS di D.I.Yogyakarta

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan kantor BPR dan BPRS dari tahun 2012-2016 hampir sama namun yang membedakan hanya pada tahun 2016 jumlah BPR sebanyak 53 unit dan BPRS 11 unit. Karena ada 1 BPR yang sudah dilikuidasi oleh OJK yaitu BPR Agra Arthaka hal ini disebabkan karena NPL-nya terlalu tinggi dan bank tidak dapat menyetatkan dirinya (OJK, 2018). Namun disisi lain OJK juga mengamati pertumbuhan BPRS di Yogyakarta, saat ini pangsa pasar Bank Syariah di Yogyakarta melebihi pangsa pasar nasional yaitu sebesar 7,9% sedangkan *market share* perbankan syariah secara nasional sebesar 5% (Nugraha, 2018).

OJK mengamati bahwa pertumbuhan pembiayaan/kredit dari BPR lebih kecil dibandingkan dengan BPRS. Hal ini disebabkan karena, masyarakat di Yogyakarta lebih memilih mengambil kredit/pembiayaan di BPRS dibandingkan di BPR. Namun dari sisi NPF/NPL ternyata NPL BPR mencapai 5% sedangkan BPRS mencapai 8%. Hal ini harus segera ditangani oleh BPRS mengingat aset BPR lebih besar dibandingkan BPRS sedangkan NPF BPRS lebih tinggi maka harus diantisipasi sebelum terjadi kesulitan keuangan yang mengakibatkan bangkrut (Linangkung, 2018).

Sesuai dengan ketentuan (BI) Bank Indonesia berdasarkan SEBI Nomor 6/23/BPMP tanggal 31 Mei 2004 menyatakan bahwa tingkat NPF baik apabila kurang dari lima persen (BI, 2018). Salah satu BPRS di D.I.Yogyakarta yang memiliki nilai NPF > 5% setiap triwulannya adalah BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) yang beralamat di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 131

Banguntapan Yogyakarta. Tingkat NPF di BDW pada periode 2014 mencapai 13,50% dan 12,34%, sedangkan periode 2015 mengalami penurunan sebesar 8,81%, pada periode 2016 meningkat pada bulan September mencapai 11,57% jika dibandingkan periode lainnya. Ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Rasio NPF BPRS BDW

No	Periode	Tahun (Rasio NPF %)		
		2014	2015	2016
1	Maret	7,04%	12,73%	10,26%
2	Juni	13,50%	11,90%	9,67%
3	September	13,12%	9,53%	11,57%
4	Desember	12,34%	8,81%	7,33%

Sumber: Laporan keuangan triwulan BPRS BDW (BI, 2018)

Tingginya nilai NPF dipengaruhi oleh kemampuan BPRS BDW pada proses penyaluran pembiayaan baik dalam tindakan, pengendalian, atau pengawasan. Apabila hal ini tidak segera ditangani maka bank akan mengalami kesulitan keuangan yang disebut dengan *financial distress*. *Financial distress* diartikan sebagai sebuah tahap menurunnya kondisi keuangan suatu perusahaan yang terjadi sebelum bangkrut/likuidasi (Platt dan Platt, 2002). Jika *financial distress* ini tidak segera ditindak lanjuti maka dapat mengakibatkan likuidasi dan bank masuk dalam daftar *de-isting*. Berikut ini tabel mengenai daftar jumlah BPR dan BPRS yang dilikuidasi oleh OJK dari tahun 2015-2018:

Tabel 1.2 Daftar BPR dan BPRS yang Dilikuidasi OJK Tahun 2014–2018

No	Jenis Bank	Jumlah
1	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	31
2	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	3
	Total	34

Sumber : Data diolah dari laporan Lembaga Penjamin Simpanan (2018)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah BPR yang dilikuidasi sebanyak 34 unit dan BPRS sebanyak 3 unit. Perkembangan BPRS cukup mengkhawatirkan karena hampir setiap tahun terdapat BPRS yang ditutup seperti BPR. Bank Syariah termasuk BPRS yang dianggap kecil dan aman namun ada kemungkinan untuk ditutup karena mulai mengalami penurunan tingkat kesehatan banknya seperti BPR. Maka dari itu diperlukan model sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kebangkrutan maka BPRS harus melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan. Serta untuk mengetahui apakah bank dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (Kasmir, 2012).

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank terbaru ini menggunakan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang menyempurnakan metode CAMELS sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan termasuk di dalamnya BPRS menyatakan bahwa di dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah RBBR (*Risk Based Bank Rating*) yang terdiri dari 4 faktor yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) (OJK, 2018).

Faktor yang digunakan untuk menguji tingkat kesehatan bank ini adalah faktor profil risiko menggunakan rasio NPF dan rasio FDR,

sedangkan faktor rentabilitas menggunakan rasio ROA dan rasio BOPO, dan faktor modal menggunakan rasio CAR. Dalam penelitian ini faktor faktor (GCG) *Good Corporate Governance* tidak digunakan karena GCG menggunakan laporan *self assessment* bank. Pada laporan GCG BPRS sendiri tidak dipublikasikan di *website* BI, OJK dan *website* masing-masing BPRS. Selain itu BI dan OJK juga belum mengeluarkan Undang-Undang mengenai penerapan GCG pada BPRS. Dengan adanya RBBR ini diharapkan bank dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan segera melakukan perbaikan.

Dalam penelitian ini akan mengambil sampel penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di D.I.Yogyakarta dimulai pada tahun 2014 karena pada periode tersebut dimulai adanya BPRS yang dilikuidasi oleh OJK. Maka dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat kesehatan bank dan bank mana saja yang mengalami *financial distress*, sehingga pihak bank dapat mengevaluasi serta memperbaiki kinerja perusahaan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan prediksi mengenai *financial distress* yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dari Wahyudi (2017) tentang Analisis Keuangan Untuk Mengukur Potensi *Financial Distress* Pada BPRS di Indonesia 2013-2016. Rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio permodalan, rasio asset, rasio manajemen, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa CAR tidak

berpengaruh terhadap ROA dengan sig $0,891 > 0,05$. BOPO dan NPF memiliki pengaruh yang sig $0,000$ dan $0,003 < 0,005$. Dan FDR tidak signifikan terhadap ROA dengan sig $0,429 > 0,005$ dengan arah positif.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Tingkat Kesehatan BPRS Berdasarkan Metode *Risk Based Bank Rating (RBBR)* Terhadap Potensi *Financial Distress* (Studi Kasus pada BPRS di DIY Periode 2014-2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diambil sebagai rumusan masalah bagi peneliti yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan metode *Risk Based Bank Rating* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh antara NPF terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh antara FDR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?
4. Apakah terdapat pengaruh antara BOPO terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?
5. Apakah terdapat pengaruh antara ROA terhadap *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?
6. Apakah terdapat pengaruh antara CAR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan metode *Risk Based Bank Rating* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara NPF terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara FDR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara BOPO terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara ROA terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.
6. Untuk mengetahui pengaruh antara CAR terhadap potensi *financial distress* pada BPRS di DIY periode 2014-2017.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharap memberi manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat bagi Akademika

Penelitian ini sebagai media pembelajaran khususnya untuk penulis dalam memecahkan masalah pada penelitian sebagai pemberi sumbangan pemikiran yang baru sesuai disiplin ilmu selama kuliah dan sebagai referensi terbaru bagi penelitian di kemudian hari.

2. Manfaat bagi teoritik

Secara teoritis penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan serta masukan bagi perkembangan ilmu perbankan variabel baru apa sajakah yang dapat digunakan untuk menentukan potensi *financial distress* pada BPRS di DIY.

3. Manfaat bagi bank

Penelitian ini berguna bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah diteliti untuk segera mengambil keputusan sebelum terjadinya kebangkrutan. Bank dapat melakukan penyehatan bank sebelum dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi oleh OJK.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, teknik analisis data.

4. BAB IV : Pembahasan

Bab ini menjelaskan analisis deskriptif data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan dari setiap pengujian hipotesis dan pemaparan hasil keseluruhan penelitian.

5. BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, serta saran dalam penelitian ini.